

RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK VI

BIDANG PEMBINAAN

Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Manado, dengan tema **“Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim”**, pada hari ini Rabu tanggal 31 Oktober 2012:

Memperhatikan : 1. Pengarahan Ketua MA RI.
2. Pengarahan Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial.
3. Pengarahan Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial.
4. Pengarahan Ketua Muda MA RI Bidang Pengawasan.
5. Pengarahan Ketua Muda MA RI Bidang Pembinaan.

Membaca : Paparan yang disajikan :
1. Ketua Muda Pembinaan MA RI.
2. Sekretaris MA RI.
3. Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI.
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI.
7. Kepala Badan Pengawasan MA RI
8. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Pendidikan Hukum dan Peradilan MA RI

Mendengar : Tanggapan para peserta serta penjelasan dari:

- a. Pemakalah.
- b. Nara Sumber.

Menimbang : Perlu dirumuskannya diskusi dalam Komisi VI untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas peradilan di Bidang Non-Teknis (Kesekretariatan).

MERUMUSKAN:

1. Semua pimpinan pengadilan tingkat banding harus melakukan supervisi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di wilayahnya masing-masing dan meningkatkan peran pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI dalam bidang pembinaan dan pengawasan.
2. Diperlukan komitmen yang tinggi dari pimpinan seluruh satuan kerja untuk meningkatkan koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka mencapai laporan keuangan tahun 2012 dengan opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP).
3. Seluruh satuan kerja perlu meningkatkan program *access to justice* melalui layanan prodeo dan sidang keliling (*zitting platsen*) dalam rangka pelaksanaan SEMA 10/2010 dan SEMA 6/2012. Sedangkan untuk pelaksanaan posbakum perlu dibangun Nota Kesepahaman (Memory of Understanding/MoU) agar pelaksanaan posbakum di pengadilan dapat berjalan dengan baik.
4. Mewajibkan seluruh ketua pengadilan tingkat banding memiliki alamat *e-mail* pribadi.
5. Mewajibkan seluruh pimpinan pengadilan tingkat banding membuka dan memantau website satuan kerja di wilayahnya masing-masing.
6. Seluruh pejabat eselon I perlu berkoordinasi dalam rangka mengimplementasikan teknologi informasi (TI) agar maju secara bersama-sama.

7. Kenaikan pangkat dengan sistem *paperless* (otomatis tanpa usul) yang sudah dilaksanakan lingkungan peradilan agama agar dilaksanakan juga di seluruh lingkungan peradilan.
8. Seluruh Pengadilan Negeri harus meningkatkan pelaksanaan CTS/SIPP.
9. Perlu ada mutasi dan rotasi wakil sekretaris pengadilan tingkat banding secara nasional.
10. Perlu disediakan anggaran untuk melaksanakan perekaman sidang secara audio-visual, khususnya pada pengadilan Tipikor, sebagai pelaksanaan SEMA 4/2012.
11. Perlu disediakan anggaran untuk sewa rumah dinas untuk pimpinan dan hakim, sepanjang rumah dinas belum tersedia. Dan secara bertahap perlu dibangun rumah dinas pada setiap pengadilan.
12. Badan Pengawasan perlu melakukan pembinaan dalam hal teknis pengawasan kepada para hakim tinggi pengadilan tingkat banding.
13. Balitbang Diklat Kumdil harus mampu merespon dan mengakomodir kebutuhan sumber daya manusia seluruh satker dalam rangka peningkatan integritas dan intelektualitas.
14. Perlu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dipublikasikan di website.
15. Pola mutasi dan karir tenaga teknis peradilan yang sudah dibuat di Ditjen Badilum agar dapat juga diterapkan di lingkungan peradilan lain.
16. Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan yang baru perlu segera ditetapkan sebagai prasyarat proses kenaikan kelas pengadilan dan pembentukan pengadilan baru.
17. Perlu direncanakan pembentukan pengadilan TUN pada setiap ibu kota provinsi.

REKOMENDASI:

1. Seluruh satker harus bekerja keras melaksanakan reformasi birokrasi.
2. Perlu segera ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan yang baru.
3. Perlu segera dilakukan mutasi dan rotasi terhadap wakil sekretaris pengadilan tingkat banding secara nasional.
4. Wajib melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Manado, 31 Oktober 2012

Tim Perumus:

Ketua



Dr. Aconur, S.H., M.H.

Sekretaris



Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Anggota:

1. Drs. Wahyudin, M.Si
2. Drs. H. Farid Ismail, S.H., M.H.
3. Sugiyoto, S.H., M.M.
4. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
5. Ade Usman, S.H., M.H.
6. Drs. Bahrin Lubis, S.H., M.H.
7. Sutisna, S.Sos, M. Pd

